

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Manajemen laba selalu berkaitan erat dengan teori keagenan. Menurut Jao dan Pagalung (2011) mengungkapkan adanya hubungan agen dan principal. Agen merupakan manajemen yang mengelola perusahaan sedangkan principal merupakan para pemegang saham. Teori keagenan ini timbul dikarenakan adanya pemisahan kepentingan antara agen dan principal. Konflik kepentingan antara agen dan principal ini muncul ketika agen tidak melaksanakan keinginan principal sehingga menghasilkan biaya keagenan. Dengan adanya konflik yang terjadi didalam perusahaan dan biaya keagenan yang timbul sehingga dibutuhkan teori yang dapat melindungi pemegang saham.

Teori keagenan adalah konsep kuno, bukan pengembangan bertahap yang melibatkan kombinasi hubungan dan ide (Bendickson et al,2016). Ciri penting dari keagenan adalah perbedaan kepentingan prinsipal dan agen, dan pengetahuan yang tidak sempurna dari prinsipal tentang kontribusi agen (Bosse dan Phillips,2016). Dengan asumsi agen dan prinsipal adalah pihak yang mementingkan diri sendiri, muncul masalah bagi prinsipal ketika: (1) kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan (2) agen memiliki informasi yang lebih baik daripada prinsipal.

Kondisi ini menciptakan probabilitas, dimana agen tidak akan bertindak demi kepentingan utama (Bosse dan Phillips, 2016).

Para pemegang saham telah kehilangan kepercayaan dalam integritas angka-angka akuntansi, terutama setelah beberapa perusahaan melaporkan skandal keuangan di seluruh dunia, dan itu menyebabkan meningkatnya perhatian pada kualitas pendapatan di antara para peneliti (Al-Dhamari dan Ismail, 2014). Perusahaan-perusahaan terkenal seperti Enron, Tyco, WorldCom, dan Xerox, yang memberikan laporan keuangan yang baik sehingga tidak terjadi manipulasi laba yang digunakan untuk menghasilkan hasil keuangan mereka (Litt et al, 2013).

2. Corporate Governance

Diskusi tentang *corporate governance* dimulai pada awal 80-an di mana manajer Amerika telah mengabaikan kepentingan pemegang saham yang menjatuhkan jatuhnya harga saham. *Corporate governance* telah dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi kebanyakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Prinsip OECD berfokus pada perusahaan yang diperdagangkan secara publik, baik keuangan maupun non-keuangan, dan memiliki tujuan untuk membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan kerangka hukum, kelembagaan dan peraturan untuk *corporate governance*. Mereka juga memberikan panduan dan saran untuk bursa saham, investor, perusahaan, dan pihak yang mempunyai peranan dalam pengaturan *corporate governance* yang baik.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) bahwa corporate governance adalah seperangkat aturan tentang hubungan diantara berbagai pihak yaitu pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban diantara mereka. *Corporate governance* yang baik dapat membantu mencegah skandal perusahaan, penipuan, dan potensi pertanggungjawaban perdata dan pidana dari perusahaan. *Corporate governance* yang baik meningkatkan citra dan reputasi perusahaan dan membuatnya lebih menarik bagi investor, pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan. Ada bukti dari banyak penelitian bahwa *corporate governance* yang baik menghasilkan manfaat ekonomi langsung bagi perusahaan, membuatnya lebih menguntungkan dan kompetitif.

Adapun Corporate Governance, diantaranya:

a) Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peranan dalam menerapkan *corporate governance* secara efektif dan mempersiapkan laporan keuangan yang dapat diandalkan (KNKG, 2006). Dengan adanya komisaris independen didalam perusahaan maka dapat mencegah kecurangan yang dilakukan oleh kepentingan pemegang saham dan stakeholder (KNKG,2006). Menurut Kenneth (2010) mengemukakan bahwa pengawasan dewan komisaris akan lemah apabila komisaris tersebut berasal dari pemegang saham,

sehingga diperlukan komisaris independen yang telah mempunyai kedudukan.

b) Ukuran Dewan Komisaris

Dalam pedoman Good Corporate Governance (2006) menyatakan dewan komisaris merupakan struktur organisasi yang memiliki tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan, memberi masukan kepada direksi, dan mengontrol perusahaan apakah melaksanakan Good Corporate Governance. Struktur *corporate governance* di Indonesia sesuai dengan UU No. 1 tahun 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris dan dewan direksi masing-masing minimal 2 orang untuk perusahaan yang telah go publik.

c) Kualitas Auditor

Menurut Marpaung dan Latrini (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit merupakan kondisi yang mana auditor harus mengetahui dan mengungkapkan tentang adanya suatu kesalahan dalam sistem akuntansi auditeenya. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2008) menyatakan bahwa kualitas auditor yang sering digunakan adalah ukuran kantor akuntan publik atau sering disebut KAP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty yang mengungkapkan bahwa

pelanggan dari auditor Non Big 6 menghasilkan manajemen laba yang lebih tinggi. Saat ini KAP Big 6 sudah menjadi Big 4, maka KAP Non Big 4 akan melakukan manajemen laba yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

d) Kepemilikan Institusional

Herawati dkk. (2014) menyatakan bahwa adanya pengawasan yang dilaksanakan suatu perusahaan dan para investor dapat mencegah tindakan para manajer. Adanya proses monitoring diharapkan mampu membuat perusahaan agar lebih efektif dalam menggunakan aset sebagai sumber daya perusahaan dalam operasinya. Dengan adanya pengawasan seperti ini, keputusan manajemen diharapkan mampu bertanggungjawab dan adil kepada pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mencegah perusahaan dari kecurangan yang dilakukan yang dapat merugikan perusahaan.

e) Komite Audit

Komite audit sangat penting didalam perusahaan. Komite audit mempunyai fungsi yaitu untuk mengontrol semua transaksi yang berkaitan sehingga menjadikan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya fungsi tersebut, komite audit memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat sebagai panduan bagi manajer untuk melakukan investasi dan dapat menarik investor untuk menanam modalnya.

f) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang dikuasai oleh dewan direksi, manajemen, komisaris maupun pihak yang ikutserta dalam pengambilan keputusan (Anggraeni,2013). Kepemilikan manajerial didalam perusahaan bertugas untuk menyeimbangkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham eksternal (Listiyani,2003). Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham yang digunakan untuk menyeimbangkan kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham.

3. Konvergensi International Financial Reporting Standar (IFRS)

Hakim et al. (2010) mengakui bahwa beberapa negara bersedia mengadopsi IFRS karena dua alasan. Pertama, negara-negara terbelakang dengan standar akuntansi “berkualitas rendah” yang rendah baru-baru ini mengadopsi IFRS agar sejajar dengan negara-negara maju seperti Inggris dan Australia. Kedua, negara-negara dengan standar akuntansi domestik berkualitas tinggi seperti Australia dan Kanada juga mengadopsi IFRS atau mengubah standar domestik mereka agar dapat bersaing dalam lingkungan global.

IFRS adalah serangkaian standar akuntansi internasional yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang baik antara manajemen

perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Adopsi IFRS mengarah ke laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan komprehensif sesuai dengan standar nasional (Madawaki,2012). Investor diharapkan untuk membayar lebih sedikit untuk menyesuaikan laporan keuangan dan akan dapat memahami mereka dan mengurangi biaya finalisasi mereka (Odia dan Ogiedu,2013).

Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Sasaran program konvergensi tersebut adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009, dengan target pencapaian tahun 2012. Artinya pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan DSAK IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas. DSAK IAI memilih menggunakan metode bertahap dalam melakukan program konvergensi tersebut (Kartikahadi, dkk. 2016).

4. Manajemen Laba

Manajemen perusahaan adalah faktor yang sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sehingga manajemen diharapkan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laporan keuangan.

Manajemen laba tidak selalu berkaitan dengan memanipulasi data, tetapi lebih memilih model akuntansi untuk mengatur keuntungan yang dilakukan berdasarkan *accounting regulations*. Apabila perusahaan berada dalam keadaan yang mana manajemen tidak bisa mencapai target

laba yang telah ditentukan, maka manajer akan melakukan meningkatkan laba yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Manajemen laba dilakukan oleh principal maupun agen dengan banyak cara. Menurut Scott (2000) menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Hal ini terjadi ketika pergantian CEO baru dengan mengungkapkan jumlah kerugian yang sangat tinggi. Perilaku ini mampu meningkatkan laba pada masa yang akan datang.

2. *Income Minimizations*

Hal ini terjadi ketika perusahaan terjadi profitabilitas yang tinggi. Apabila laba di masa yang akan datang dianggap turun maka dapat dilakukan dengan pengambilan laba pada tahun yang lalu.

3. *Income Maximization*

Hal ini terjadi ketika tindakan manajemen laba dilakukan pada saat menurunnya laba perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan *net income* yang tinggi untuk mencapai bonus yang besar.

4. *Income Smoothing*

Perusahaan melakukan perataan laba yang dilaporkan sehingga dapat mencegah terjadinya fluktuasi laba yang tinggi.

5. Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset, total penjualan, jumlah karyawan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin mudah ia mendapatkan modal luar dan semakin besar modalnya. Seorang investor tertarik pada perusahaan yang memberikan pengembalian tinggi, jadi para investor akan menginvestasikan modalnya. Ketersediaan dana ini dari modal investor membuat perusahaan lebih mudah untuk menggunakan peluang investasi. Perusahaan dengan total aset yang tinggi mengungkapkan bahwa perusahaan telah memiliki tahap kedewasaan yang mana dalam tahap ini arus kas perusahaan bernilai positif sehingga mempunyai pencapaian yang baik dalam jangka waktu yang lama, menggambarkan stabilitas perusahaan, dan mampu menghasilkan laba yang besar.

6. Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap (hutang) untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana yang mana dana tersebut digunakan untuk menutupi biaya tetap atau beban tetap. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama ketika dibubarkan (dilikuidasi). Menurut Hanafi dan Halim (2007) mengungkapkan bahwa apabila rasio utang yang tinggi maka leverage keuangan perusahaan juga

tinggi. Di satu sisi, rasio utang yang lebih tinggi, maka semakin tinggi tingkat ketidakpastian memperoleh pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Tetapi di sisi lain, ketika digunakan dengan sengaja, leverage keuangan meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham.

7. Return on Equity (ROE)

Return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas modal sendiri. Rasio ini membahas tentang suatu perusahaan yang menggunakan sumber daya yang dapat menghasilkan laba atas ekuitas. *Return on equity* (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas dimana dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan aktivitas operasi perusahaan yang berguna untuk menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang dimilikinya. ROE menjelaskan berapa persentase laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit moneter ekuitas yang diinvestasikan dalam perusahaan. ROE tidak menentukan berapa banyak uang tunai yang akan dikembalikan kepada pemegang saham, karena itu tergantung pada keputusan perusahaan tentang pembayaran dividen. Hal ini untuk mengetahui indikasi yang baik apakah perusahaan mampu menghasilkan laba yang bernilai ataupun risiko yang mungkin ditimbulkan investasi (Berman, Knight and Case, 2013).

B. Penurunan Hipotesis

Konvergensi IFRS berpengaruh terhadap Manajemen Laba

Didalam teori keagenan terdapat hubungan antara principal dan agen (Jao dan Pagulung, 2011). Manajemen diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemegang saham. Di lain sisi, principal wajib mengetahui bagaimana kemampuan manajemen dalam perusahaan dengan informasi yang asimetri yang menjadikan cara untuk melakukan manajemen laba sehingga diperlukan konvergensi IFRS.

Menurut Ismail, dkk. (2013) mengungkapkan bahwa dengan adanya penerapan standar akuntansi berbasis IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. maka terjadinya penurunan laba setelah perusahaan melaksanakan standar akuntansi yang berbasis IFRS sehingga dapat merugikan perusahaan. Standar akuntansi internasional mempunyai tujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan kebijakan akuntansi yang boleh dilakukan dan mampu untuk membatasi pertimbangan kebijakan manajemen terhadap manipulasi laba sehingga dapat menimbulkan kualitas laba yang meningkat (Cai et al, 2008).

IFRS berfokus pada *principle-based* yang mendorong manajemen untuk melakukan realisasi anggaran dan memberikan pendapat yang logis. IFRS mendorong adanya pengungkapan secara rinci yang melaporkan laporan keuangan yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan *fair value*. Dengan mengadopsi konvergensi IFRS menjadikan manajemen sulit untuk melaksanakan perilaku yang menguntungkan diri sendiri dalam melakukan praktik manajemen laba. Semakin besar konvergensi IFRS, maka

semakin rendah manajemen laba didalam perusahaan. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H1 : Konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Proporsi Dewan Komisaris Independen Memoderasi Hubungan antara Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent dimana agen mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan principal sehingga menimbulkan informasi yang asimetri (Priantinah,2008). Adanya informasi yang asimetri dapat menyebabkan manajer untuk melakukan manajemen laba yang dapat merugikan perusahaan. Cara untuk mencegah adanya perbedaan kepentingan maka diperlukan adanya proporsi dewan komisaris independen didalam suatu perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen memoderasi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen merupakan anggota dewan yang terdiri dari luar perusahaan. Apabila proporsi dewan komisaris independen semakin tinggi maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin bagus (Supriyono,2014). Menurut Rahmawati (2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Komisaris independen bertindak sebagai komisaris yang independen dan obyektif dalam mengatur pemegang saham mayoritas maupun minoritas dengan pemangku kepentingan seperti manajer, kreditur, debitur, atau pihak lain yang terkait dengan keperluan perusahaan.

Komisaris independen harus melaksanakan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. IFRS berfokus pada *principle-based* sehingga mendorong manajemen untuk melakukan realisasi anggaran dan memberikan laporan keuangan yang berkualitas. IFRS mengungkapkan adanya pengungkapan yang lebih rinci sehingga para pengguna laporan dapat memahami dan mendapatkan informasi yang akurat serta mengungkapkan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan *fair value*. Dengan mengadopsi IFRS menjadikan manajemen sulit untuk melaksanakan perilaku yang menguntungkan diri sendiri yang menjadikan cara untuk melakukan tindakan manajemen laba. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan maka semakin rendah manajemen laba. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesisnya yang dikembangkan adalah:

H2: Proporsi dewan komisaris independen memperkuat hubungan negatif antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

Ukuran Dewan Komisaris Memoderasi Hubungan antara Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Ukuran dewan komisaris memoderasi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent dimana agent mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan principal sehingga menimbulkan informasi yang asimetri (Priantinah,2008). Dengan informasi yang asimetri menjadikan cara

untuk melakukan praktik manajemen laba. Untuk dapat mencegah adanya manajemen laba didalam perusahaan maka diperlukan ukuran dewan komisaris.

Menurut Midiastuti dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Apabila ukuran dewan komisaris semakin tinggi, maka manajemen laba yang dilaksanakan juga semakin besar. Hal ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris yang tinggi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini diperkuat oleh Natalia dan Laksono (2012) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris tidak menjadi penentu utama dari pengawasan terhadap manajemen laba.

Menurut Klein (2002) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berkaitan dengan komite audit dalam melaksanakan tugas. Apabila ukuran dewan komisaris semakin banyak maka tugas anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena adanya komite dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Dengan mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi maka akan mendorong adanya keterbukaan pada semua bidang. Adanya keterbukaan tersebut dapat memberikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap masalah yang terjadi didalam perusahaan sehingga dapat mencegah praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3: Ukuran dewan komisaris memperkuat hubungan negatif antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

Kualitas Auditor Memoderasi Hubungan antara Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent dimana agent terus mengetahui informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan principal sehingga menyebabkan informasi yang asimetri (Priantinah,2008). Dengan informasi yang asimetri yang dapat menimbulkan tindakan manajemen laba. Untuk dapat mencegah adanya manajemen laba didalam perusahaan diperlukan adanya kualitas auditor. Auditor dianggap mampu untuk menghubungkan antara kepentingan principal dan agent dalam mengelola perusahaan.

Kualitas auditor memoderasi antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Latrini (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit merupakan kondisi yang mana auditor harus mengetahui dan mengungkapkan mengenai adanya suatu kesalahan dalam sistem akuntansi auditeenya. Apabila kualitas audit semakin baik maka pelanggaran akuntansi akan semakin berkurang, sehingga mengurangi tindakan manajemen laba yang dipengaruhi oleh konvergensi IFRS. Kemudian Sanjaya (2008) mengungkapkan kualitas auditor yang sering dipakai adalah ukuran kantor

akuntan publik (KAP). Penelitian lain dilakukan oleh Herawaty (2008) mengungkapkan bahwa karyawan dari auditor Non Big 6 mengungkapkan adanya *discretionary accrual* yang lebih tinggi dari yang diungkapkan oleh klien auditor Big 6, sehingga karyawan dari auditor Non Big 6 menjadi lebih tinggi terhadap manajemen laba. Sekarang KAP Big 6 telah berubah menjadi Big 4, maka diduga KAP Non Big 4 melakukan manajemen laba yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Dengan informasi yang asimetri maka dibutuhkan auditor yang berkualitas sebagai pihak yang menyelesaikan masalah yang ada didalam perusahaan. Para pengguna laporan keuangan lebih percaya terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang berkualitas. Auditor yang bekerja di KAP *Big four* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan KAP *non-big four* sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. IFRS sebagai standar yang meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya IFRS maka dapat mencegah manajemen untuk memanipulasi data. Selain itu kualitas audit diharapkan memperkuat pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba, karena dengan adanya kualitas audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Semakin besar kualitas auditor maka semakin rendah manajemen laba. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H4: Kualitas auditor memperkuat hubungan negatif antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

Kepemilikan Institusional Memoderasi Hubungan antara Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan membahas tentang adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent dimana agent lebih mengetahui informasi tentang perusahaan dibandingkan principal sehingga menyebabkan informasi yang asimetri (Priantinah,2008). Dengan informasi yang asimetri yang akan digunakan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. Cara untuk mencegah adanya perilaku manajemen laba maka diperlukan adanya kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan yang dikuasai oleh lembaga misalnya perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan perbankan atau lembaga lain yang diuji dengan jumlah saham yang dimiliki (Fadhilah, 2014). Menurut Herawati (2014) mengungkapkan bahwa adanya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan dan pihak investor institusional dapat mencegah tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh manajer. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Praditia (2010) mengungkapkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Tetapi berbeda dengan Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Hal ini diperkuat oleh Midiastuty dan

Mahfoedz (2003) mengungkapkan investor institusional sebagai investor mempunyai pengalaman dengan total kepemilikan sehingga bisa mengontrol manajemen dalam mencegah perilaku manajer dalam melaksanakan manajemen laba. Sedangkan konvergensi IFRS yang berfokus pada *principle-based* yang dilakukan melalui pendekatan *fair value* untuk melaporkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dapat mencegah perilaku yang dapat menguntungkan diri sendiri tindakan manajemen laba yang ditandai dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi. Dengan adanya konvergensi IFRS dapat membuat manajemen kesulitan untuk dalam melakukan tindakan manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah manajemen laba. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H5:Kepemilikan institusional memperkuat hubungan negatif antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

Komite Audit Memoderasi Hubungan antara Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan membahas bahwa adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent dimana agent lebih mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan principal (Priantinah,2008). Dengan informasi yang asimetri yang menjadikan cara untuk melakukan manajemen laba. Untuk dapat mencegah adanya manajemen laba maka diperlukan komite audit. Keberadaan dan tugas komite audit sangat

diperlukan dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan peran komite audit sebagai pengawas laporan keuangan. Komite audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, pengawasan terhadap audit eksternal, dan mengawasi sistem pengendalian internal sehingga mencegah terjadinya perilaku yang dapat menguntungkan manajemen dalam melaksanakan tindakan manajemen laba.

Komite audit memoderasi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap fungsi pengawasan yang efektif. Menurut peraturan BEJ No.Kep-305/BEJ/07-2004 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Komite audit adalah komite yang ditentukan oleh dewan komisaris untuk melaksanakan pengawasan dalam mengelola perusahaan. Tugas komite audit berhubungan dengan laporan keuangan yang berkualitas, karena komite audit dapat membantu dewan komisaris untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, pengawasan didalam perusahaan, dan sistem pelaporan keuangan. Adanya pengawasan komite audit dapat meningkatkan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Dengan mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi maka akan mendorong

adanya keterbukaan pada semua bidang yang diperkuat oleh adanya komite audit yang tinggi. Semakin tinggi komite audit didalam perusahaan maka semakin rendah manajemen laba. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H6: Komite audit memperkuat hubungan negatif antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

Kepemilikan Manajerial Memoderasi Hubungan antara Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Teori keagenan membahas adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dimana *agent* mengetahui informasi mengenai perusahaan dibandingkan *principal* sehingga menimbulkan informasi yang asimetri (Priantinah,2008). Dengan informasi yang asimetri menjadikan cara bagi manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan manajemen laba. Untuk itu diperlukan adanya kepemilikan manajerial didalam perusahaan. Kepemilikan manajer dapat memilih kebijakan dan ikutserta dalam mengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang berlaku dalam perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dikuasai oleh direksi, manajemen, komisaris maupun pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Anggraeni,2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Jao dan Pagulung (2011) mengungkapkan kepemilikan saham yang besar dapat dilihat dari nilai ekonomisnya yang dapat digunakan untuk

memonitor. Apabila kepemilikan manajerial rendah, maka perilaku yang menguntungkan manajer akan semakin tinggi. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gideon (2005) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap manajemen laba namun memiliki pengaruh yang lemah.

Kepemilikan manajerial memoderasi antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Mekanisme kepemilikan manajerial yang ada di perusahaan dapat mencegah meningkatnya manajemen laba yang dikarenakan adanya konvergensi IFRS pada perusahaan dengan dua cara. Pertama, adanya proses manajemen resiko. Jika struktur kepemilikan manajerial memiliki kualitas yang tinggi maka akan meningkatkan kualitas proses manajemen resiko (Bies,2006). Kedua, dengan cara monitoring. Apabila *corporate governance* berkualitas tinggi maka akan meningkatkan kualitas monitoring sehingga dapat mencegah perilaku yang menguntungkan para manajer maupun pemegang saham. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfordz (2003) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang membatasi perilaku yang dapat menguntungkan manajer dalam melakukan manajemen laba. Dengan mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi maka akan mendorong adanya keterbukaan pada semua bidang. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin rendah manajemen laba.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H7:Kepemilikan manajerial memperkuat hubungan negatif antara konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

C. Model Penelitian

Adapun model penelitian yang berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Model Penelitian

